



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 April 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SUB UNIT KERJA : BIDANG KETENAGALISTRIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMAM NUGRAHA HERU SANTOSA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN**
3. NHK : **211090**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 59.085.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m²/60 m² di KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 59.085.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 155.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 730.926.061**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 973.011.061**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 973.011.061

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.